

Bab Dua Belas

Kesimpulan

12.1. Kesimpulan

Persoalan pokok studi ini adalah memperoleh pemahaman bagaimana sistem kepercayaan Marapu berfungsi dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidakamanan pangan Masyarakat Wunga di daerah yang kering dan sulit. Dari penelitian ini tergambar bahwa Kepercayaan Marapu memiliki peran yang sangat besar dalam mengkondisikan masyarakat untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidakamanan pangan rumah tangga Masyarakat Wunga.

Kepercayaan Marapu yang Bersifat Mengunci Masyarakat

Kepercayaan kepada Marapu bersifat “mengunci” Masyarakat Wunga untuk harus menetap di wilayah dengan lingkungan alam yang ada. Mengunci dalam pengertian, kepercayaan ini mengkondisikan pengikut untuk tetap berada dekat dengan “pusat kehidupannya”, yakni *Paraingu* tempat Marapu atau leluhur mereka bersemayam. Mereka, terlepas dari agama formal yang mereka anut, percaya akan kehidupan sesudah kematian, yakni kehidupan rohaniah. Marapu atau leluhur merekalah yang akan mengantarkan mereka menuju *Parai Marapu* sebagai tempat kehidupan mereka setelah kematian. Untuk itulah Masyarakat Wunga enggan untuk hidup jauh dari kampung mereka, oleh karena keterikatan yang tinggi dengan *Paraingu Wunga* sebagai pusat kehidupan mereka. Singkatnya, kepercayaan Marapu bersifat “mengunci”, namun

sekaligus berfungsi memperkuat solidaritas masyarakat, sehingga masyarakat Wunga dapat saling membantu dalam situasi yang mendesak.

Tiga Nilai Marapu yang Dipegang Teguh

Walaupun bersifat “mengunci” dan mengkondisikan masyarakat untuk menerima kehidupan di wilayah yang kering dan sulit, tidak membuat Masyarakat Wunga bersikap pasif, menerima kesulitan hidup. Marapu juga berfungsi menopang masyarakat untuk dapat bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungan alam yang kering dan sulit, serta menghadapi ketidakpastian dan ketidakamanan pangan. Hal ini dapat terjadi oleh karena adanya nilai Marapu yang secara teguh dipegang dan dianut oleh masyarakat. Ketiga nilai Marapu tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, Marapu mendorong masyarakat untuk mempertahankan identitas mereka sebagai sumber kekuatan bersama (solidaritas); *kedua*, Marapu mengkondisikan masyarakat menyelaraskan kehidupan mereka dengan lingkungan alam dan sesama sebagai penopang utama kehidupan mereka; *ketiga*, Marapu membentuk satu pola kepemimpinan yang efektif dalam mengelola masyarakat yang hidup pada wilayah yang kering dan sulit. Tiga nilai Marapu yang terkait dengan Tuhan, sesama dan alam ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Marapu sebagai identitas masyarakat

Kehidupan di wilayah yang kering, berbatu dan kondisi pangan yang tidak menentu hanya dapat dihadapi melalui kerjasama antar masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kohesifitas masyarakat yang diikat oleh satu identitas kolektif (Koster, 2003; Polletta and Jasper, 2001). Dalam konteks Masyarakat Wunga, Marapu merupakan identitas kolektif tersebut. Sebagaimana konsep *sacred* dari Durkheim (1995), Marapu merupakan sistem nilai yang mengalami pengsakralan atau

penyucian oleh masyarakat Wunga dan masyarakat Sumba secara umum. Marapu menjadi identitas bersama yang berperan menjaga ikatan sosial masyarakat sebagai sumber kekuatan bersama untuk menghadapi tantangan kehidupan di wilayah yang kering dan sulit.

Kepercayaan bahwa Marapu merupakan leluhur yang menurunkan mereka, merupakan inti dari ikatan sosial tersebut itu. Setiap anggota masyarakat berusaha untuk menjaga identitas tersebut. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Marapu dipandang sebagai tindakan yang mencederai identitas bersama dan merupakan tindakan salah yang dapat mendatangkan malapetaka bagi semua warga. Untuk itulah, sanksi adat atau moral dari masyarakat, akan diberikan kepada mereka yang melanggar aturan-aturan kolektif yang ada. Melalui tindakan hukuman (*punishment*) individual tersebut masyarakat disadarkan akan batas-batas nilai kolektif yang dikehendaki dalam sistem kepercayaan Marapu. Hukuman yang bersifat individual ini sekaligus memberikan dampak pada kesadaran kolektif.

Upaya untuk menjaga identitas ini tidak saja dilakukan melalui pemberian hukuman bagi mereka yang melanggar, tetapi juga melalui ritual yang berfungsi untuk selalu menyegarkan pengetahuan masyarakat tentang makna-makna kolektif yang diyakini dalam sistem kepercayaan Marapu. Penguatan akan identitas bersama ini pada akhirnya membangun dan memperkuat solidaritas yang pengejawantahannya dalam kepercayaan Marapu dilakukan dalam bentuk *Pawandang* (gotong royong). *Pawandang* merupakan pendekatan utama yang digunakan Masyarakat Wunga pada seluruh proses usaha pertanian, dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Solidaritas ini juga termanifestasi dalam bentuk *mandara* (barter barang dan makanan) yang menjadi

salah satu tiang penyangga kehidupan ketika masyarakat mengalami kesulitan pangan.

Marapu sebagai pendorong kehidupan untuk selaras dengan alam

Kehidupan di wilayah yang kering dan dengan sumber daya alam yang sangat terbatas mensyaratkan tiga hal penting, yakni: (a) alam harus senantiasa dijaga; (b) pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang terbatas secara efisien; dan (c) pemanfaatan sumber daya alam secara adil. Prinsip keadilan menjadi sangat penting untuk menghindari tindakan eksploitasi individu yang berlebihan terhadap alam. Dalam konteks Masyarakat Wunga, pengakuan terhadap keberadaan Alkhalik sebagai sumber kehidupan dan pemilik seluruh alam merupakan dasar pertama (*Nuku*) dalam tata kehidupan (*Lii Ndai*) yang disepakati para leluhur (Marapu). Pemahaman ini membentuk kesadaran masyarakat bahwa alam adalah sumber kehidupan yang harus dipelihara keberlangsungannya guna menopang kehidupan mereka. Upaya menjaga alam ini dilakukan melalui ritual yang dilakukan sebelum dan sesudah memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan juga melalui pembentukan mitos-mitos yang melekat pada sumber daya alam. Mitos tentang mata air akan mengering apabila ada pohon di sekitarnya dipotong misalnya merupakan upaya pemitosan yang efektif untuk menjaga tindakan masyarakat terhadap perusakan alam. Ritual dan mitos ini berfungsi sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bertanggung jawab, efisien dan adil.

Marapu sebagai Dasar Munculnya Struktur dan Perilaku Kepemimpinan yang Efektif

Identitas dan tindakan yang selaras dengan alam hanya dapat terjaga apabila adanya kepemimpinan dalam masyarakat yang efektif

mengelola keseluruhan dinamika masyarakat. Dalam kepemimpinan masyarakat Sumba umumnya dan juga sebagaimana terjadi di Wunga, terdapat pemisahan secara fungsional antara pemimpin religius dan pemimpin kehidupan duniawi. Pemimpin religius diperankan oleh *Ratu*. Sementara itu pemimpin kehidupan duniawi oleh *Maramba* (Raja). Dalam konteks Masyarakat Wunga saat ini, peran religius lebih banyak dilakukan oleh *Ratu* dan *Wunang* (juru sembahyang). Sementara itu pemimpin duniawi oleh tokoh-tokoh *Kabihu* utama (terutama dari *Kabihu Tula Praing*) yang menjaga pelaksanaan tata kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Masyarakat Wunga yang hidup di wilayah yang kering dengan sumber daya alam yang terbatas, kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan yang bisa menjaga identitas kolektif mereka dan kepemimpinan yang bisa memberikan jaminan akses bagi seluruh masyarakat kepada sumber daya alam yang terbatas secara adil. Pemisahan kepemimpinan di Wunga antara pemimpin adat dan pemimpin duniawi relatif efektif untuk menjaga kedua hal tersebut. Seluruh kegiatan ritual dipimpin dan dikelola oleh *Ratu* dan *Wunang*. Sementara segala urusan duniawi diurus oleh tokoh-tokoh *Kabihu* utama. Para pemimpin ini mendapat legitimasi yang penuh, dibungkus oleh kepercayaan bahwa fungsi mereka adalah fungsi turunan yang tidak dapat digugat. Ketaatan masyarakat kepada mereka senantiasa terjaga dalam hubungan dengan kepercayaan kepada Marapu. Efektifitas kepemimpinan mereka terletak pada otoritas yang bersifat absolut dan tidak dapat dipertanyakan. Keistimewaan ini cenderung membentuk kepemimpinan mereka sebagai kepemimpinan yang kharismatik. Walaupun akar otoritas yang didapat tidak rasional (bandingkan dengan tiga legitimasi dasar bagi dominasi dari Weber), kepemimpinan mereka senantiasa merujuk kepada nilai-nilai Marapu

sebagaimana dijabarkan dalam *Lii Ndai* (lihat pembahasan Sub Bab Persekutuan Masyarakat), kepemimpinan keduanya senantiasa mengacu kepada *Hara* (tata cara peri kehidupan), *Huri* (berlaku adil dan merata dalam menikmati hasil usaha atau dikenal dengan ungkapan *Tadua-nya na wai wolu langgana – Tadua-nya na ihi mihi mbarung* atau “kita menikmati bersama manisnya gula – kita menikmati bersama asinnya hasil meting laut”), serta *Pangerangu* (menjadi teladan dalam peri kehidupan terhadap sesama). Hal inilah yang menjadi pengontrol terhadap otoritas yang sangat tinggi dari *Maramba* dan *Ratu*.

Ketiga nilai Marapu di atas menjadi “benteng” yang efektif menjaga kelangsungan hidup Masyarakat Wunga di daerah yang kering dan sulit, terutama ketika harus berhadapan dengan nilai-nilai yang datang dari luar melalui program-program pembangunan yang cenderung membongkar identitas penduduk lokal, merusak lingkungan yang ada, dan mengkooptasi peran kepemimpinan lokal yang telah terbukti cukup efektif mengatasi berbagai persoalan yang ada.

12.2. Sumbangan terhadap Debat Teoritis tentang Pembangunan

Penelitian ini paling tidak dapat memberikan dua sumbangan penting terhadap debat teoritis tentang pembangunan.

Peran Nilai Agama Suku dalam Pembangunan

Penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara agama suku atau kepercayaan masyarakat suku dan tindakan masyarakat sebagai manifestasi dari nilai-nilai agama yang dipercayai. Terutama berkaitan dengan kuatnya internalisasi nilai-nilai agama suku

kedalam berbagai bentuk tidakan masyarakat dalam mempertahankan kehidupan mereka di wilayah yang sulit.

Dalam dunia sosiologi, berbicara tentang hubungan agama dengan tindakan penganutnya, tidak bisa lepas dari pemikiran dua Sosiolog besar yakni Max Weber dan Karl Marx. Keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang peran agama, yakni Weber melihat agama sebagai sumber nilai (*values*) yang menjadi dasar tindakan bagi manusia, sedangkan Marx melihat agama hanyalah sebagai mekanisme pelarian dari kenyataan hidup. Agama menurut Marx adalah candu. “Candu itu memberikan kepuasan, tetapi kepuasan itu semu karena tidak mengubah situasi buruk si pecandu. Seperti candu, agama memberikan kepuasan semu tanpa mengubah situasi buruk orang kecil” (Suseno, 2005:123). Agama dalam hal ini bukan menjadi sumber acuan nilai yang mendasari tindakan manusia secara positif, tetapi lebih sebagai mekanisme “pelarian” oleh karena ketidakmampuan menghadapi situasi sulit yang dihadapi.

Sebagaimana pandangan Weber (2006) tentang peran agama Kristen Protestan Calvinist dengan semangat kapitalisme (kerjas keras dan hidup hemat) yang mendorong produktivitas dunia Industri di Barat, hasil penelitian ini menggambarkan adanya hubungan antara agama suku dalam mendorong para pengikutnya bekerjasama dan bekerja keras untuk mempertahankan kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat pada bab-bab sebelumnya, yakni internalisasi nilai-nilai agama suku secara sistematis terhadap praktek-praktek masyarakat dalam mempertahankan kehidupan mereka di wilayah yang sulit. Akan tetapi, jika kerja keras dan hidup hemat kelompok Calvinist terkait dengan nilai panggilan atau *calling* (Weber, 2006: xxxvi), maka dalam agama suku Marapu, nilai-nilai positif ini lebih terkait dengan nilai solidaritas dan saling menolong.

Mereka harus bekerja keras agar dapat menolong dirinya sendiri dan sesamanya. Agama menjadi pengikat atau sumber identitas yang menguatkan mereka dalam bertindak bersama (Polletta and Jasper, 2001).

Pemikiran Weber mendasari berkembangnya kapitalisme yang hingga sekarang ini semakin menguat. Sedangkan pemikiran Marx mendasari berkembangnya sosialisme sebagai bentuk kritik terhadap perkembangan kapitalisme. Budiman (2006:42) menguraikan: perkembangan Kapitalisme ini mendapat kritik dari Marx oleh karena Kapitalisme menciptakan ketimpangan yang kian melebar antara pemilik sarana produksi dengan para pekerja. Pekerja hanya dilihat sebagai komoditas yang harganya didasarkan pada sistem pasar, yakni berdasarkan permintaan dan penawaran. Sebagai komoditas, para pekerja teralienasi dari dirinya sendiri dan lingkungannya, serta kehilangan nilai *intrinsic* (hakiki) dari keberadaannya sebagai manusia yang bebas menentukan. Orang yang dilanda alienasi akan merasakan suatu kebingungan, keterasingan, dan kesepian karena merasa apa yang dilakukannya bukan atas dasar kesadaran atau pilihan bebasnya, tetapi didesak oleh kekuatan luar yang tidak dikehendaki bahkan tidak diketahuinya sama sekali.

Penelitian tentang peran agama suku ini walaupun secara umum sejalan dengan pandangan Weber yang berfungsi secara positif dalam mendorong tindakan kerja keras masyarakat untuk mempertahankan kehidupan mereka, akan tetapi pada tataran praktis juga banyak memberikan koreksi, terutama pada sistem kapitalisme yang ada. Sebaliknya, walaupun penelitian ini secara langsung menolak pandangan Marx bahwa agama hanya merupakan mekanisme pelarian (hanya ilusi), akan tetapi pada bagian tertentu, cenderung sejalan, seperti mengedepankan pendekatan komunal

dalam mempertahankan kehidupan mereka. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) Kapitalisme menghadirkan kebebasan bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dirinya serta mendorong langkah-langkah inovatif yang didasari oleh tindakan rasional. Sebaliknya praktek agama suku cenderung bersifat tertutup, sulit berubah terutama hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan mereka seperti penyediaan pangan.
- (b) Kapitalisme bersifat aktif dan ekspansif, yakni mendorong orang untuk secara aktif melakukan pencarian keuntungan sebesar-besarnya. Dalam praktek agama suku bersifat sebaliknya, yakni menjadi sistem yang lebih hati-hati dan mendorong orang untuk memanfaatkan secukupnya.
- (c) Tindakan ekspansif dalam sistem kapitalisme cenderung bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam yang ada. Eksploitasi yang berlebihan memberikan dampak pada kerusakan alam yang sangat serius. Sebaliknya praktek agama suku cenderung menjadi sistem yang respek terhadap alam dan melakukan proteksi secara sistematis, sehingga keberlanjutan sumber daya alam lebih terjamin. Agama suku cenderung meletakkan alam sebagai bagian dari kehidupannya yang tidak terpisahkan.
- (d) Dalam sistem kapitalisme bersifat individual, yakni individu didorong untuk bekerja secara individual. Demikian halnya dalam kaitannya dengan resiko, individu bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul. Sebaliknya dalam praktek agama suku cenderung menghadirkan sistem komunal, yakni mendorong untuk bekerjasama mengatasi berbagai

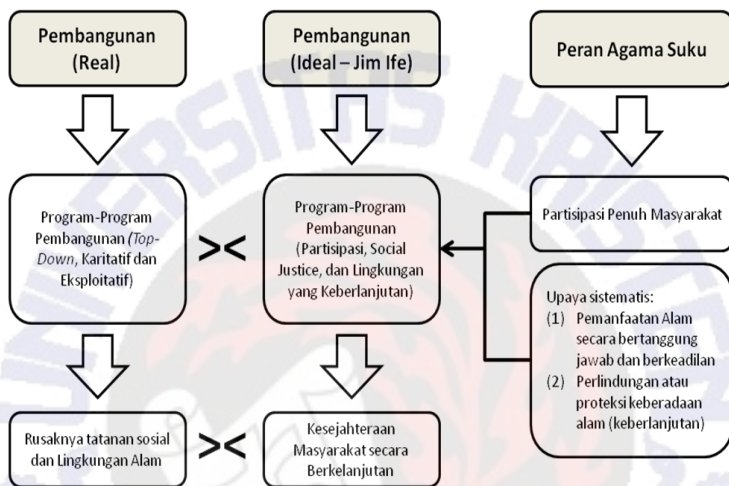
permasalahan yang dihadapi. Dalam hubungannya dengan resiko, lebih bersifat *sharing* resiko di antara anggota masyarakat.

- (f) Praktek individualistik yang sangat tinggi pada sistem kapitalisme cenderung menguras modal sosial yang ada di dalam masyarakat dari pada menghasilkannya. Sistem pasar yang berjalan menjadikan segalanya barang dagangan dan menggantikan hubungan manusia dengan laba. Sistem ini cenderung memperlemah hubungan sosial dan menekankan uanglah yang penting, bukan nilai-nilai (Fukuyama, 2005:305). Sebaliknya praktek agama suku memperkaya modal sosial, bahkan menjadi sumber nilai dan pengikat hubungan sosial di dalam masyarakat.

Partisipasi, Keadilan Sosial dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan adalah upaya sistematis yang terutama dilakukan oleh negara (melalui pemerintah) dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera secara berkelanjutan. Amartya Sen (1999) mengatakan pembangunan adalah “yang dapat dilihat sebagai perluasan kemerdekaan sejati yang dirasakan semua orang”. Dengan kata lain, tujuan pembangunan adalah mendapatkan kemerdekaan yang sejati bagi semua orang. Secara ideal, untuk mencapai tujuan pembangunan, Jim Ife (2008) menekankan tiga hal penting, yakni: partisipasi masyarakat, keadilan sosial (*social justice*) dan lingkungan yang berkelanjutan. Akan tetapi, dalam realitas yang terjadi, sebagaimana tergambar dalam pembahasan Bab 11, praktek pembangunan oleh negara justru bertolak belakang dengan prasyarat tersebut, yakni cenderung *top-down*, karitatif dan eksploitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa peran agama suku dapat menjadi kontrol dalam mendorong program-program pembangunan ke arah model pembangunan yang ideal tersebut.



Gambar 12.1.

Pembangunan dan Peran Agama Suku

Peran agama suku terkait dalam hubungannya dengan sesama manusia dan dengan alam. Dalam hubungannya dengan sesama, nilai-nilai agama suku membangun kebersamaan yang solid. Sedangkan dalam hubungan dengan alam, nilai-nilai agama suku terinternalisasi secara sistematis dalam upaya pemanfaatan alam secara bertanggung jawab dan berkeadilan, serta upaya pemeliharaan atau proteksi keberadaan sumber daya alam yang ada. Dalam agama suku, alam adalah milik Alkhalik yang harus dijaga dan

dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Semua orang dimungkinkan untuk memanfaatkan (akses) sumber daya alam tersebut dengan secukupnya dan adil. Mekanisme pemanfaatan diatur melalui mekanisme ritual (permohonan pemanfaatan), pantangan dan denda adat yang mengontrol tindakan eksploitatif masyarakat. Tidak hanya mengatur mekanisme pemanfaatannya, agama suku juga mengembangkan mekanisme untuk menjaga atau memproteksi sumber daya alam yang ada. Pemberian teladan oleh yang tua kepada yang muda, pantangan dan mitos merupakan mekanisme yang mengontrol agar keberadaan sumber daya alam yang ada tetap terjaga. Dibalik berbagai tindakan mistis yang melandasi hubungan manusia dengan alam ini, sebenarnya lebih menggambarkan satu tindakan rasional:

- (a) Sumber daya alam yang terbatas di wilayah ini hanya akan memberikan kemanfaatan apabila dimanfaatkan secukupnya dan dilindungi keberadaannya. Tingkat pemanfaatannya haruslah sebanding dengan tingkat reproduksi atau regenerasi sumber daya alam tersebut.
- (b) Pemanfaatan sumber daya alam tersebut haruslah menjamin tingkat akses yang sama dari seluruh masyarakat (*social justice*). Ketidaksamaan akses dari sebagian masyarakat hanyalah akan mendorong tindakan eksploitatif yang mengancam keberlanjutan dari sumber daya alam tersebut.
- (c) Kedua hal di atas, yakni pemanfaatan secukupnya serta adil, akan terjaga dengan baik jika ada mekanisme aturan yang meringkainya. Dalam hal ini, pantangan, ritual dan mitos merupakan bagian dari mekanisme pengaturan tersebut.